



**RINGKASAN**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**  
**(RLPPD) TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**TAHUN 2022**



# **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Banjar adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Kabupaten Banjar semula terdiri atas 15 Kecamatan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru dimekarkan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru, dan Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kota Banjarbaru. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 dibentuklah Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, Kecamatan Beruntung Baru, dan Kecamatan Sambung Makmur. Kemudian melalui Peraturan Daerah 12 Tahun 2006 dibentuk Kecamatan Paramasan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 membentuk Kecamatan Telaga Bauntung. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Dibentuklah Kecamatan Cintapuri Darussalam. Sekarang secara administratif Kabupaten Banjar terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banjar**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah (KM<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>
1.	Aluh-Aluh	82,48	19	
2.	Beruntung Baru	61,42	12	
3.	Gambut	129,30	12	2
4.	Kertak Hanyar	45,83	10	3
5.	Tatah Makmur	35,47	13	
6.	Sungai Tabuk	147,30	20	1



No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
7.	Martapura	42,03	19	7
8.	Martapura Timur	29,99	20	
9.	Martapura Barat	149,38	14	
10.	Astambul	216,50	22	
11.	Karang Intan	215,35	26	
12.	Aranio	1.166,35	12	
13.	Sungai Pinang	458,65	11	
14.	Paramasan	560,85	4	
15.	Pengaron	433,25	12	
16.	Sambung Makmur	134,65	7	
17.	Mataraman	148,40	15	
18.	Simpang Empat	141,10	15	
19.	Telaga Bauntung	158,00	4	
20.	Cintapuri Darussalam	428,29	11	
<b>Jumlah</b>		<b>4.668,5</b>	<b>277</b>	<b>13</b>

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

Kabupaten Banjar berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38" Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km<sup>2</sup> atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Banjar berbatasan dengan :

Sebelah utara : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebelah timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebelah selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.

Sebelah barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.

Jumlah penduduk Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah 560.769 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 283.838 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 276.931 jiwa. Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2021 didukung 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, 6 Badan, 23 Dinas, 20 Kecamatan dengan jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 6.259 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.578 orang dan perempuan sebanyak 3.681 orang.



## BAB II CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro di Kabupaten Banjar sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Capaian Kinerja Makro Kabupaten Banjar**

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	% Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,18	69,89	1,026%
2.	Angka Kemiskinan	2,55	3,04	19,216%
3.	Angka Pengangguran	3,87	3,98	2,842%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,96	3,21	263,78%
5.	Pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar harga berlaku)	27.742.000	30.738.620	10,802%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,32193	0,344	6,856%

Sumber : BPS Kab. Banjar (2022)

### 1) Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah 69,89 masuk kategori sedang mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu 69,18. IPM dapat dilihat dari komponen pembentuknya yaitu Angka Harapan Hidup tahun 2021 adalah 67,41 tahun; Harapan Lama Sekolah adalah 12,73 tahun; Rata-rata Lama Sekolah adalah 7,52 tahun; dan Pengeluaran riil/per kapita adalah 12.707 ribu rupiah, semua komponen IPM mengalami kenaikan.

### 2) Angka Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Banjar pada tahun 2021 (Rp 517.293) mengalami kenaikan sebesar 4,35% dibanding GK tahun 2020 (Rp 495.715). Sedangkan pada tahun 2016 GK di Kabupaten Banjar adalah (Rp. 380.647). Setiap tahunnya terjadi pergerakan



jumlah penduduk miskin yang sulit untuk diketahui *trend*-nya naik turun, namun dari tahun 2020 (15,12 ribu) mengalami kenaikan yang tinggi pada tahun 2021 (18,07 ribu).

3) Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Banjar tahun 2021 sebesar 3,98% yang artinya dari 100 orang Angkatan kerja di Kabupaten Banjar yang termasuk kategori pengangguran ada sekitar 3 – 4 orang. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 3,87%. Hal ini salah satunya disebabkan banyaknya pemberi kerja yang terdampak pandemi covid-19 dan terpaksa merumahkan karyawan-karyawannya atau bahkan perusahaannya tidak mampu bertahan dan tutup.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pada tahun 2021 sebesar 3,21 persen meningkat dibanding tahun 2020 sebesar -1,96 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar relatif lebih baik dari Provinsi Kalimantan Selatan, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan -1,81%. Pada tahun 2021 17,10 persen PDRB Kabupaten banjar disumbangkan oleh kategori pertanian, 14,56 persen kategori perdagangan, dan 14,48 persen kategori pertambangan.

5) Pendapatan Per Kapita (dilihat dari PDRB per kapita)

Ukuran kesejahteraan memang sulit dicakup dalam satu indikator yang komprehensif, dan untuk data pendapatan per kapita tidak tersedia di instansi-instansi Kabupaten Banjar, namun data yang mendekati dengan pendapatan per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku untuk tahun 2020 dan 2021 yaitu Rp. 27.742.000 dan Rp. 30.738.620.

6) Ketimpangan Pendapatan

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan pendapatan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara 0-1. Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh bahwa nilai koefisien gini Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah sebesar 0,332 berarti di Kabupaten Banjar distribusi pendapatan penduduk cukup merata. *Gini ratio* tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,344. Mayoritas Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan koefisien gini pada tahun 2021.



### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

### **1. Urusan Pendidikan**

Dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan, ada 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

- a) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian kinerja dalam pelaksanaan realisasi indikator tersebut adalah 60,56% dengan data indikator Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD di wilayah Kabupaten Banjar sebanyak 11.911 jiwa, sementara itu sebagai indikator pembanding adalah jumlah anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Banjar sebanyak 19.667 jiwa.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banjar masih ada sekitar 39,44% anak di usia PAUD yang belum mengikuti PAUD atau mungkin mengikuti pendidikan di Daerah lain atau lembaga pendidikan lainnya.

- b) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 86,78% dengan data indikator jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar sebanyak 52.363 jiwa, sementara itu sebagai indikator pembanding adalah Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Banjar sebanyak 60.337 jiwa.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banjar masih ada sekitar 13,22% anak di usia pendidikan dasar yang belum mengikuti pendidikan dasar atau mungkin mengikuti pendidikan di Daerah lain atau lembaga pendidikan lainnya.



- c) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Capaian kinerja dalam pelaksanaan realisasi indikator tersebut adalah 69,46% dengan indikator jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama sebanyak 19.703 jiwa, sementara itu sebagai indikator pembanding adalah jumlah anak usia 13-15 tahun di Kabupaten Banjar sebanyak 28.364 jiwa.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banjar masih ada sekitar 30,54% anak di usia Sekolah Menengah Pertama yang belum mengikuti pendidikan dasar atau mungkin mengikuti pendidikan di Daerah lain atau lembaga pendidikan lainnya.

- d) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 20,63% dengan indikator jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan sebanyak 6.253 jiwa, sementara itu sebagai indikator pembanding adalah jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan sebanyak 30.313 jiwa.

## 2. Urusan Kesehatan

Dalam penyelenggaraan Urusan Kesehatan, ada 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

- a) Rasio daya tampung rumah sakit rujukan

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 0,13% yang terdiri atas jumlah daya tampung Rumah Sakit Rujukan sebanyak 745 dengan perbandingan total jumlah penduduk di Kabupaten Banjar pada tahun 2021 sebanyak 560.769 jiwa.

Jumlah daya tampung tersebut berdasarkan pada perhitungan jumlah tempat tidur pasien di Rumah Sakit yang berada di wilayah Kabupaten Banjar dan Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan.



- b) Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 16,67 persen yang terdiri atas jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi sebanyak 2 (dua) rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha dengan akreditasi Utama dan Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital dengan akreditasi Paripurna dengan perbandingan jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Banjar sebanyak 5 (lima) Rumah Sakit. Rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 84,66% yang terdiri atas jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sebanyak 10.150 jiwa dengan perbandingan jumlah ibu hamil di Kabupaten Banjar sebanyak 11.989 jiwa.
- d) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 88,35% yang terdiri atas jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sebanyak 10.109 jiwa dengan perbandingan jumlah ibu bersalin di Kabupaten Banjar sebanyak 11.442 jiwa.
- e) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 94,01% yang terdiri atas jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 10.245 jiwa dengan perbandingan jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Banjar sebanyak 10.899 jiwa.
- f) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 91,29% yang terdiri atas jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 38.789 jiwa dengan perbandingan jumlah balita di Kabupaten Banjar sebanyak 42.491 jiwa.  
Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2021, pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan memberlakukan pembatasan beberapa pelayanan dalam rangka mencegah penularan virus Covid-19, sehingga terdapat balita yang tidak bisa melakukan kunjungan ke beberapa Pusat Kesehatan di Kabupaten Banjar.





- g) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 72,44% yang terdiri atas jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 64.256 jiwa dengan perbandingan jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Banjar sebanyak 88.701 jiwa.

Pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2021 pusat pembelajaran atau sekolah di Kabupaten Banjar baru melakukan pembelajaran tatap muka mulai bulan Juni 2021 dan tidak setiap hari. Hal ini menyulitkan tenaga Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan di sekolah-sekolah.

- h) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 41,68% yang terdiri atas jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 158.789 jiwa dengan perbandingan jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Banjar sebanyak 381.077 jiwa.

Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2021, pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan memberlakukan pembatasan beberapa pelayanan dalam rangka mencegah penularan virus Covid-19.

- i) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 88,41% yang terdiri atas jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 39.083 jiwa dengan perbandingan jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten Banjar sebanyak 44.205 jiwa.

Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2021 terjadi wabah covid-19, dimana usia 60 tahun ke atas tergolong rentan terjangkit virus covid-19 sehingga terjadi penurunan kunjungan warga ke pusat pelayanan kesehatan.



- j) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 73,65% yang terdiri atas jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 29.044 jiwa dengan perbandingan jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Banjar sebanyak 39.433 jiwa.  
Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2021 terjadi wabah covid-19 sehingga masyarakat pada umumnya yang sehat mengurangi intensitas ke pusat pelayanan kesehatan.
- k) Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 90,89% yang terdiri atas jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4.739 jiwa dengan perbandingan jumlah penderita diabetes melitus di Kabupaten Banjar sebanyak 5.214 jiwa.  
Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2021 terjadi wabah covid-19 sehingga masyarakat pada umumnya yang sehat mengurangi intensitas ke pusat pelayanan kesehatan.
- l) Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 96,57% yang terdiri atas jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 1.015 jiwa dengan perbandingan jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Banjar sebanyak 1.051 jiwa.
- m) Persentase orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 35,29% yang terdiri atas jumlah penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 3.362 jiwa dengan perbandingan jumlah penderita tuberkulosis di Kabupaten Banjar sebanyak 9.526 jiwa.



Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2021 terjadi wabah covid-19 sehingga masyarakat pada umumnya yang sehat mengurangi intensitas ke pusat pelayanan kesehatan.

- n) Persentase orang dengan resiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) mendapatkan pelayanan deteksi dini *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) sesuai standar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 76,48% yang terdiri atas jumlah orang dengan resiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang mendapatkan pelayanan deteksi dini *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) sesuai standar sebanyak 11.513 jiwa dengan perbandingan jumlah orang dengan resiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) di Kabupaten sebanyak 15.054 jiwa.

Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2021 terjadi wabah covid-19 sehingga masyarakat pada umumnya yang sehat mengurangi intensitas ke pusat pelayanan kesehatan.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum ada 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

- a) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 32,56% terdiri dari luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten Banjar sebesar 490 ha dan luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten sebesar 1.505 ha.

- b) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 62,50% terdiri dari luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten Banjar sebesar 506,25 ha



dan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten Banjar sebesar 810 ha.

- c) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 17,42% terdiri atas luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun hektar (ha) ditingkatkan hektar (ha) direhabilitasi hektar (ha) dioperasikan dan pelihara sebesar 104 ha dan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Banjar sebesar 597 hektar (ha).

- d) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 52,06% terdiri atas jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Banjar sebanyak 96.369 dan jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten Banjar sebanyak 185.114.

- e) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 61,30% terdiri atas jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk ditambah jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT ditambah jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebesar 113.472 dan jumlah rumah di Kabupaten Banjar sebesar 185.114.

- f) Rasio kepatuhan IMB Kabupaten

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 100% terdiri atas jumlah pemanfaatan izin mendirikan bangunan yang sesuai peruntukannya sebanyak 131 dan jumlah izin mendirikan bangunan yang berlaku sebanyak 131.

- g) Tingkat kemantapan jalan Kabupaten

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 71,44% terdiri atas panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap sepanjang 558,23 km dan panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten Banjar sepanjang 781,39 km.



- h) Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 93,93% terdiri atas jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis sebanyak 480 dan jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten sebanyak 511.
- i) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi  
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 100% terdiri atas jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi sebanyak 7 proyek dan jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak 7 proyek.

#### **4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ada 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota  
Capaian indikator tersebut adalah 100% terdiri dari jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 11 unit dan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021 sebanyak 11 unit.
- b) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten  
Capaian indikator tersebut adalah 0% terdiri dari jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan tambah Rumah Tangga penerima subsidi uang sewa tambah Rumah Tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 0 dan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan sebanyak 0.  
Pada tahun 2021 tidak ada kegiatan relokasi program pemerintahan daerah, sehingga capaian menjadi 0%.



- c) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar (ha) di Kab/ Kota yang ditangani  
Capaian indikator tersebut adalah 20,94% terdiri dari luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar (ha) yang ditangani sebesar 25,03 hektar (ha) dan luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar (ha) sebesar 119,54 hektar (ha).  
Setiap tahunnya Kabupaten Banjar terus berusaha mengurangi luas kawasan permukiman kumuh, namun dikarenakan keterbatasan anggaran maka pengentasan kawasan permukiman kumuh dilakukan secara bertahap
- d) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)  
Capaian indikator tersebut adalah 3,10% terdiri dari jumlah unit rumah tidak layak huni sebanyak 5.313 unit dan jumlah total unit rumah Kabupaten Banjar sebanyak 171.155 unit.
- e) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)  
Capaian indikator tersebut adalah 98,92% terdiri dari jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 169.313 unit dan jumlah unit rumah Kabupaten Banjar sebanyak 171.155 unit.

## 5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ada 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

- a) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan  
Capaian dari indikator tersebut adalah 100% yang terdiri atas jumlah pengaduan yang ditangani sebanyak 44 pengaduan dan jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk sebanyak 44 pengaduan.
- b) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan  
Capaian dari indikator tersebut adalah 60,66% yang terdiri atas jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 37 dan jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 61.



Penegakan Perda/Perkada dilakukan ketika ada pelanggaran ataupun adanya aduan dari masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 hanya ada 37 Perda/Perkada yang dilanggar, sedangkan 24 Perda/Perkada yang lainnya tidak ada pelanggaran.

- c) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana  
Capaian dari indikator tersebut adalah 482.279 warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Warga negara yang mendapatkan layanan ini hanya warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana.
- d) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana  
Capaian dari indikator tersebut adalah 543.535 warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Warga negara yang mendapatkan layanan ini hanya warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.
- e) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  
Capaian dari indikator tersebut adalah 83.819 warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Warga negara yang mendapatkan layanan ini hanya warga negara yang menghubungi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS), dimana 1 Kecamatan terdapat 1 Operatornya.
- f) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  
Capaian dari indikator tersebut adalah 100% yang terdiri atas jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah tambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah sebanyak 87 layanan dan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Banjar sebanyak 87 kejadian.  
Tidak semua kebakaran ditangani langsung oleh UPT Pemadam Kebakaran karena keterbatasan unit Mobil Pemadam Kebakaran dan luasnya wilayah Kabupaten Banjar, namun UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar tetap membantu dalam bentuk



fasilitasi menghubungi Pemadam Kebakaran Swasta untuk dapat segera memadamkan api dalam kurun waktu kurang dari 15 menit.

- g) Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran

Capaian dari indikator tersebut adalah 11 menit 31 detik waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran.

## 6. Urusan Sosial

Dalam penyelenggaraan Urusan Sosial ada 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

- a) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Capaian indikator tersebut sebesar 77,40% terdiri dari jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 3.157 jiwa dan populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis sebanyak 4.079 jiwa.

- b) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator tersebut sebesar 100% terdiri dari jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran sebanyak 250.239 jiwa dan populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten sebanyak 250.239 jiwa.





## I. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar

**Tabel 3**  
**Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten Banjar**

Tahun	Peringkat Kabupaten se Nasional	Skor	Kategori
2016	77 dari 396	3.2391	Sangat Tinggi
2017	104 dari 396	3.0100	Sangat Tinggi
2018	-	3.1105	Sangat Tinggi
2019*	-	3.5069	Sangat Tinggi

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Banjar (2022).

\*= angka sementara

- b. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar

Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selama 11 tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2011-2020**

No.	Tahun Anggaran	Opini atas Laporan Keuangan
1.	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11.	2020	Masih proses audit

Sumber : BPKPAD, 2022

## II. RINGKASAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

- a. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021

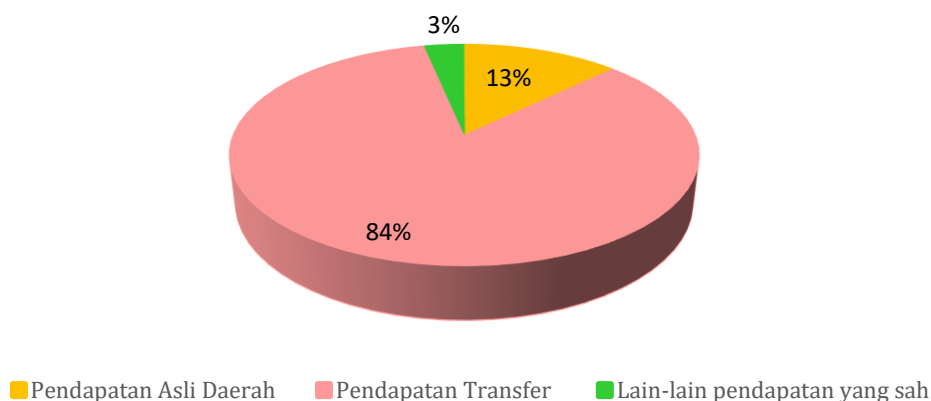


Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021, realisasi pendapatan Kabupaten Banjar adalah Rp. 1.698.527.070.874,52 Persentase proporsi realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

- Pendapatan asli daerah realisasinya sebesar Rp 217.424.226.433,52 dengan capaian 102,10%.
- Pendapatan transfer realisasinya sebesar Rp. 1.425.288.919.441 dengan capaian 97,53%.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasinya sebesar Rp. 55.813.925.000 dengan capaian 97,58%.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan transfer/dana transfer masih dominan dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terkait komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021, bisa dilihat secara detail pada gambar berikut :

**Gambar 1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021**



Adapun realisasi masing-masing uraian pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terealisasi Rp. 217.424.226.433 atau sebesar 102,10% dari target sebesar Rp. 212.958.509.185 terdiri atas :

- Pendapatan pajak daerah terealisasi Rp. 81.008.710.888 atau sebesar 104,42% dari target sebesar Rp. 70.800.000.000.
- Pendapatan retribusi daerah terealisasi Rp. 5.921.675.670 atau sebesar 85,55% dari target sebesar Rp. 6.921.706.174.



- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan terealisasi Rp. 5.596.447.089 atau sebesar 24,61% dari target sebesar Rp. 22.740.580.338.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 124.897.392.786,52 atau sebesar 111,02% dari target sebesar Rp. 112.496.222.673.

## 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang diterima dengan realisasi Rp. 1.425.288.919.441 atau sebesar 97,53% dari target Rp. 1.461.360.835.769, Pendapatan transfer terbagi atas 3 (tiga) hal yaitu Pendapatan transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan transfer Pemerintah Pusat lainnya, dan Pendapatan transfer Pemerintah Daerah lainnya.

- Pendapatan transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan (realisasi Rp. 1.087.869.392.558 dari anggaran Rp. 1.094.121.797.000 atau capaian 99,43%) terdiri atas : Dana Bagi Hasil (realisasi Rp 155.987.406.353 dari anggaran Rp. 139.582.484.000 atau capaian 111,75%); Dana Alokasi Umum/DAU (realisasi Rp. 674.081.401.000 dari anggaran Rp. 674.081.401.000 atau capaian 100%); Dana Alokasi Khusus/DAK (realisasi Rp. 257.800.585.205 dari anggaran Rp. 280.457.912.000 atau capaian 91,92%).
- Pendapatan transfer pemerintah pusat - Lainnya (realisasi Rp. 233.938.565.200 dari anggaran Rp. 234.027.986.000 atau capaian 99,96%) terdiri atas : Dana Desa (realisasi Rp. 216.454.386.200 dari anggaran Rp. 216.653.807.000 atau capaian 99,96%); Dana Insentif Daerah (realisasi Rp. 17.484.179.000 dari anggaran Rp. 17.484.179.000 atau capaian 100%).
- Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya (realisasi Rp. 103.480.961.683 dari anggaran Rp. 133.211.052.769 atau capaian 77,68%) terdiri atas : Pendapatan bagi hasil pajak (realisasi Rp. 101.030.961.683 dari anggaran Rp. 130.761.052.769 atau capaian 77,26%); Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota (realisasi Rp. 2.450.000.000 dari anggaran Rp. 2.450.000.000 atau capaian 100%) .

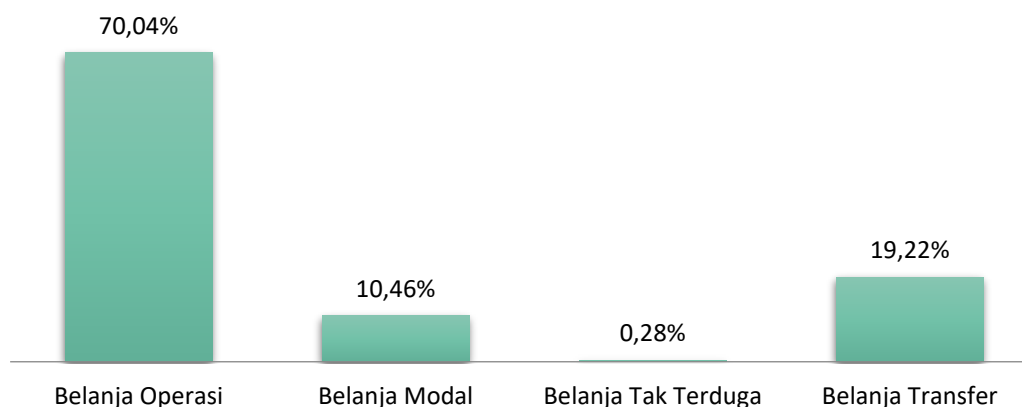
- ## 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi Rp. 55.813.925.000 atau sebesar 97,58% dari anggaran Rp. 57.199.847.975 terdiri atas : Pendapatan hibah (realisasi Rp. 55.813.925.000 dari anggaran Rp. 57.199.847.975 atau sebesar 97,58%).



b. Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021

Belanja Pemerintah Kabupaten Banjar terdiri dari 1) belanja operasi 2) belanja modal 3) belanja tak terduga. Selama tahun 2021, belanja ini untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Banjar terealisasi sebesar Rp. 1.732.445.797.955,29 dengan komponen belanja operasi 70,04% atau sebesar Rp. 1.213.450.273.846,94 Kemudian belanja modal 10,46% atau Rp. 181.257.850.520,36 selanjutnya belanja tak terduga sebesar 0,28% atau Rp. 4.813.007.998 dan belanja transfer sebesar 19,22% atau Rp. 332.924.665.590 secara detail terkait komposisi pembagian komponen belanja dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2. Belanja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020**



Realisasi belanja daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah Rp. 1.732.445.797.955 atau 93,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.860.342.573.854,41. Adapun realisasi masing-masing jenis pengeluaran daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi dengan realisasi Rp. 1.213.450.273.846,94 atau 91,64% dari anggaran Rp. 1.324.220.964.131,41 terdiri atas : belanja pegawai (realisasi Rp. 741.214.749.545 dari anggaran Rp. 783.845.924.131,41 atau capaian 94,56%); belanja barang dan jasa (realisasi Rp. 430.853.010.521,93 dari anggaran Rp. 496.229.298.253 atau capaian 86,83%); Belanja hibah (realisasi Rp. 37.248.886.390,01 dari anggaran Rp. 39.678.332.236 atau capaian 93,88%); Belanja bantuan sosial (realisasi Rp. 4.133.627.390 dari anggaran Rp. 4.467.409.500 atau capaian 92,53%).



- 2) Belanja Modal dengan realisasi Rp. 181.257.850.520,36 atau 92,52.% dari anggaran Rp. 195.902.839.862 terdiri atas : belanja modal tanah (realisasi Rp. 1.121.108.448 dari anggaran Rp. 2.425.000.000 atau capaian 46,23%); belanja Peralatan dan Mesin (realisasi Rp. 48.918.569.616 dari anggaran Rp. 53.286.920.606 atau capaian 91,80%); belanja modal gedung dan bangunan (realisasi Rp. 44.187.646.711,59 dari anggaran Rp. 48.845.211.177 atau capaian 90,46%); belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (realisasi Rp. 84.831.138.370,77 dari anggaran Rp. 89.026.208.679 atau capaian 95,29%); belanja modal aset tetap lainnya (realisasi Rp. 2.199.387.374 dari anggaran Rp. 2.319.499.400 atau capaian 94,82%).
  - 3) Belanja Tak Terduga dengan realisasi Rp. 4.1813.007.998 atau 96,26% dari anggaran Rp. 5.000.000.000.
- c. Realisasi Transfer yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar
- Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 332.924.665.590 dengan capaian 99,32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 335.218.769.872, yang merupakan transfer terdiri dari :
- 1) Transfer bagi hasil pendapatan dengan realisasi sebesar Rp. 5.763.635.004 dengan capaian 74,16% dari target sebesar Rp. 7.772.170.618.
  - 2) Transfer bantuan keuangan dengan realisasi sebesar Rp. 327.161.030.586 dan capaian 99,91% dari target Rp. 327.446.599.254 yang berasal dari transfer bantuan keuangan ke Desa.
- d. Realisasi Pembiayaan
- Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 131.423.380.925,41 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 128.823.380.925,41,- atau 102,02%.

### III. INOVASI DAERAH

Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Banjar terus berusaha memberikan yang terbaik untuk warganya, diantaranya dengan terus menciptakan inovasi-inovasi pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah (PPD) yaitu sebagai berikut :



**Tabel 5**  
**Inovasi Daerah Kabupaten Banjar**

<b>NO</b>	<b>JUDUL INOVASI</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>SKPD</b>
1	SIMONDALEV ( Sistem Monitoring dan Evaluasi )	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA LITBANG KAB. BANJAR
2	INTAN BAKILAU ( Inovasi Tata Pemerintahan Banjar Kreatif Unggul dan Maju )	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA LITBANG KAB. BANJAR
3	KLINIK PERENCANAAN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA LITBANG KAB. BANJAR
4	INTAN BANJAR ( Itsbat Nikah, Dapat Buku Nikah Akta Kelahiran )	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.BANJAR
5	JEMPOL PELANDUK ( Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan )	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.BANJAR
6	TAMBAK UDANG (datang melahirkan, bawa Akta Kelahiran untuk dibawa pulang)	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.BANJAR
7	BANJAR KERJA	Urusan Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BANJAR
8	BANJARSAPA PLUS (Batanam Banih Jajar Legowo Sakali Mawiwit Dua Kali Panen Plus)	Urusan Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BANJAR
9	PENGHAPUSAN JAMBAN APUNG "GEBRAK's" (Gerakan Bersama Realisasi Akses Sanitasi)	Urusan Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.BANJAR
10	Radio Sahabat Anak (RAHATAN) Kabupaten Banjar	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS P2KBP3A KAB.BANJAR
11	SATGAS DESA	Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN KAB. BANJAR
12	ABATASA (Ayo Basuh Tangan Pakai Sabun dan Air Mengalir)	Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN KAB. BANJAR
13	KADO SABUTING	Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN KAB. BANJAR
14	JUM'AT BUNGAS	Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN KAB. BANJAR
15	SUPER SEGER BUGER	Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN KAB. BANJAR
16	KAWANKU BUNGAS ( Klinik Hewan	Urusan Pertanian	DINAS PETERNAKAN



<b>NO</b>	<b>JUDUL INOVASI</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>SKPD</b>
	Ku Baik, Unggul dan Berkualitas)		DAN PERKEBUNAN KAB. BANJAR
17	LAPOR ABAH GURU	Urusan Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB.BANJAR
18	i-MARTAPURA	Urusan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
19	SIPINTAR (Sistem Infomasi Pengelolaan Tercepat Angka Kredit Guru)	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
20	PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA PURNA PRAJA BER BMW (Berinovasi, Mandiri, Wirausaha)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	KELURAHAN MANDARSARI
21	SIPALUI (Sistem Informasi Puskesmas Akurat Langsung Universal)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS MARTAPURA 1
22	Aplikasi APOTEKER EMAS (Apoteker Edukasi Masyarakat)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS MARTAPURA 1
23	Sistem Aplikasi Pendorong Darah (SAPIDA Puskesmas)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS MARTAPURA 1
24	SI BUNGAS (SIAPKAN IBU BERSALIN NORMAL DENGAN SENAM)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS MARTAPURA 1
25	SICETAR (Cegah Tangani Anemia Remaja)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS MARTAPURA 1
26	SIDELIMAS (Aplikasi Kader Peduli Balita BGM dan Stunting)	Urusan Kesehatan	UPT PUSKESMAS PENGARON
27	LABU CEPER (Lakukan Gerak Tubuh Cegah Hipertensi)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
28	LABU MANIS (Lakukan Gerak Tubuh Untuk Mencegah Kencing Manis)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
29	DUTA ANTI ROKOK	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
30	GALUH GAMBUT (Gerakan Lingkungan Bersih Gasan Masyarakat Gambut)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
31	LAPAT PAK RT (Lakukan Pembinaan Kepada Masyarakat Pada Keluarga Dan Kelompok Risiko Tinggi)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
32	IVA MOBILE (Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
33	PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI KEGIATAN TAPILA	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT



NO	JUDUL INOVASI	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD
	(Tanggung Jawab Pihak Laki-Laki) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GAMBUT		
34	IWAK PAIS (Ini Waktunya Pencegahan Hepatitis)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
35	HAI CINTA (Hallo Imunisasi Cerminan Peduli Balita)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
36	PREMAN PENSIUN ( Pemberian Pemahaman Pentingnya Sehat Sepanjang Tahun)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
37	MAS RAMLAN (Puskesmas Ramah Lansia)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
38	GAMBUT BUNGAS ( Gambut Bugar Sehat)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
39	TEH POCI (Temukan Penderita HIV Melalui Kelompok Kunci)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
40	HALILING (Hari Hari Bakuliling)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
41	LINTING POSYANDU (Peduli Stunting di Pos Pelayanan Terpadu)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
42	KUTU BERAS (Kunjungi Balita Batuk Kesulitan Bernafas)	Urusan Kesehatan	UPT. PUSKESMAS GAMBUT
43	PEMANFAATAN KETERSEDIAAN AIR YANG MELIMPAH MENJADI USAHA MANDIRI BERPOTENSI RATUSAN JUTA (Pabrik Air Minum Dalam Kemasan)	Urusan Pekerjaan Umum	PEMERINTAH DESA MANDIKAPAU TIMUR
44	TAMAN BACA LAYAK ANAK ( TBLA )	Urusan Pendidikan	PEMERINTAH DESA CABI KECAMATAN SIMPANG EMPAT
45	INOVASI ALAT PERAGA PAUD HELIKOPTER	Urusan Pendidikan	PEMERINTAH DESA CABI KECAMATAN SIMPANG EMPAT
46	PERPUSTAKAAN KELILING DESA	Urusan Pendidikan	PEMERINTAH DESA CABI KECAMATAN SIMPANG EMPAT
47	TIMBANGAN POSYANDU DARI BAN BEKAS	Urusan Kesehatan	PEMERINTAH DESA CABI KECAMATAN SIMPANG EMPAT
48	Wisata Sungai SRT	Urusan Pariwisata	PEMERINTAH DESA SUNGAI RANGAS TENGAH
49	USAHA BUMDESA PELOPOR DALAM RANGKA PELESTARIAN SASIRANGAN	Urusan Pariwisata	PEMERINTAH DESA LIHUNG KECAMATAN KARANG INTAN
50	MENGOPTIMALKAN WISATA ALAM UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI	Urusan Pariwisata	PEMERINTAH DESA TIWINGAN LAMA





NO	JUDUL INOVASI	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD
	DESA		KECAMATAN ARANIO

*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Kab.Banjar, 2022*

#### **BAB IV PENUTUP**

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021.

Syukur Alhamdulillah dalam kebersamaan dan kebersahajaan saat ini kita telah melewati Tahun 2021 yang merupakan Tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, secara berkelanjutan berupaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2021 mengacu pada visi Kabupaten Banjar “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah” untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 misi yaitu:

- 1) Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
- 3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah, maka penyelenggaraan pemerintahan dalam rangkaian pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 diprioritaskan untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan, dan pemenuhan Infrastruktur. RLPPD ini menjelaskan capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan



- 3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah, maka penyelenggaraan pemerintahan dalam rangkaian pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 diprioritaskan untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan, dan pemenuhan Infrastruktur. RLPPD ini menjelaskan capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD, opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, ringkasan realisasi penerimaan & pengeluaran anggaran daerah serta inovasi daerah.

Demikian gambaran yang dapat disajikan dalam penyampaian ringkasan laporan ini, sebagai satu kewajiban untuk disampaikan progres kemajuan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan dalam bingkai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar. Oleh karena itu Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif DPRD Kabupaten Banjar selaku mitra Pemerintah serta semua unsur yang terlibat. Semoga apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi catatan dan koreksi akan dilakukan perbaikan untuk tahap pelaksanaan selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Martapura, 28 Maret 2022

**BUPATI BANJAR,**



**H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom**